



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 061/Kep.1154-Bagor/2026
TENTANG
PELAKSANAAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2025-2029

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025, maka untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan selama 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kota Bandung perlu menyusun pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 8);

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025-2029 diawali dengan *baseline* penetapan Indikator, target dan capaian kinerja serta perangkat daerah pengampu/ penanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Untuk memastikan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025-2029, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dilakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Terintegrasi yang tercantum dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 66/OT.01/ORG tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Terintegrasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Roadmap Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. *Strategic Transformation Unit (STU)* merupakan unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bandung yang merupakan organ pimpinan yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. Pengampu indikator kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi General merupakan perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pengampu ketercapaian indikator kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi General;

- c. Pengampu indikator kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik merupakan perangkat daerah yang ditetapkan sebagai koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik; dan
- d. Tim Penilai Internal (TPI) atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal) terkait ketercapaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah, untuk dijadikan bahan tindaklanjut perbaikan dalam dokumen Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

KELIMA : Tim Pelaksana Roadmap Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEENAM : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juli 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 061/Kep.1154-Bagor/2026
TENTANG PELAKSANAAN ROADMAP
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025-
2029

INDIKATOR, TARGET DAN PERANGKAT DAERAH PENGAMPU INDIKATOR
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2025

No	Kegiatan Utama	Indikator	Target 2025	Capaian 2025	Perangkat Daerah Pengampu	Perangkat Daerah Pendukung
1	2	3	4	5	6	7
I.	Nilai Reformasi Birokrasi General					
1	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	4	4	SEKDA	Bagian Organisasi
2	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	4,62	4,66	Diskominfo	
		Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	3	0	Diskominfo	
3	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	81,94	82,26	SEKDA	Baperida, Inspektorat dan Bagian Organisasi
4	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	4	0	Inspektorat	
5	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3	3,1	Inspektorat	
6	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	4	4	Diskominfo	
7	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	70,14	69,17	Inspektorat	
8	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	71,51	88,9	SEKDA	Bapperida dan Bagian Hukum

9	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	87,45	97,64	SEKDA	Bagian Hukum
10	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	78	74,91	Disarpus	
11	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	3,04	3,04	Diskominfo	
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	83,42	85,01	SEKDA	Bagian PBJ
13	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP (3,00)	WTP (3,00)	BKAD	
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	85	84,43	Inspektorat	
14	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	364,9	359,5	BKPSDM	
15	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	83,5	82,9	BKPSDM	
16	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,28	89,08	SEKDA	Bagian Organisasi
		Indeks Pelayanan Publik	4,7	4,73	SEKDA	Bagian Organisasi
		Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	93	93	SEKDA	Bagian Organisasi
II.	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik					
1	Pengentasan Kemiskinan		3,68	3,78	BAPPERIDA/ dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	
2	Peningkatan Investasi		11.007	11,92	DPMPSTP/ dan Tim Percepatan Investasi Daerah (TPID);	
3	Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan		N/A	N/A	Dinas Kesehatan	

4	Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan	N/A	N/A	Dinas Pendidikan	
5	Ketahanan Pangan Nasional	N/A	N/A	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
6	Mendorong Hilirisasi	N/A	N/A	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR
TENTANG PELAKSANAAN ROADMAP
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025-
2029

EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2029

1. Indikator, Nilai dan Evaluator:
a. Lingkup Sekretariat/Dinas/Badan:

INDIKATOR PENILAIAN			NILAI	EVALUATOR
1			2	3
I.	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah		0-100	
	1.1	Persentasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	0-100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
	1.2	Persentasi Penyelesaian Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI	0-100	Inspektorat
	1.3	Persentasi Penyelesaian Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP	0-100	Inspektorat
	1.4	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	0-100	Inspektorat
	1.5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0-100	Inspektorat
	1.6	Persentasi Kepatuhan Penggunaan PDN	0-100	Inspektorat/Tim P3DN
	1.7	Persentasi Kepatuhan Penyampaian LHKAN	0-100	Inspektorat
	1.8	Laporan Realisasi APBD	0-100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	1.9	Nilai Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	0-100	Bagian Organisasi Setda
	1.10	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
	1.11	Nilai Implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK	0-100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

INDIKATOR PENILAIAN			NILAI	EVALUATOR
1			2	3
	1.12	Rata-Rata Skor Arsip Digital ASN (DMS) Pada Aplikasi My ASN	0-100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	1.13	Nilai tindak lanjut pengaduan (SP4N-LAPOR)	0-100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1.14	Nilai Satuan Inovasi Perangkat Daerah	0-100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
	1.15	Nilai Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI)	0-100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	1.16	Indeks Pelayanan Publik	0-100	Bagian Organisasi Setda
	1.17	Tingkat Kematangan Organisasi	0-100	Bagian Organisasi Setda
	1.18	Tingkat Digitalisasi Arsip	0-100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	1.19	Indeks Pemerintah Digital	0-100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1.20	Indeks Pembangunan Statistik	0-100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1.21	Indeks Kualitas Kebijakan	0-100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
	1.22	Evaluasi Produk Hukum	0-100	Bagian Hukum Setda
	1.23	Evaluasi Manajemen Risiko Perangkat Daerah	0-100	Inspektorat
	1.24	Persentasi Realisasi PBB Sektor Perkotaan Dan Perdesaan	0-100	Perangkat Daerah yang diberikan mandat sesuai ketentuan pada masing-masing instansi pemerintah daerah
	1.25	Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan	0-100	Perangkat Daerah yang diberikan mandat sesuai ketentuan pada masing-masing instansi pemerintah daerah
	1.26	Evaluasi Pelaksanaan KADARKUM dan POSBANKUM	0-100	Perangkat Daerah yang diberikan mandat sesuai ketentuan pada masing-masing instansi pemerintah daerah

INDIKATOR PENILAIAN			NILAI	EVALUATOR
1			2	3
	1.27	Indikator Evaluasi RB lainnya	0-100	Perangkat Daerah yang diberikan mandat sesuai ketentuan pada masing-masing instansi pemerintah daerah
II.	Nilai Reformasi Birokrasi Capaian Dampak		0-100	
	2.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Renstra Perangkat Daerah/ Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)	0-100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
	2.2	Capaian Dampak Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0-100	STU atau Tim Independen
III.	Total Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		0 – 100	Rata-rata dari seluruh indikator yang dinilai

b. Lingkup Kecamatan

Indikator Penilaian			Nilai	Evaluator
I.	Evaluasi RB General Perangkat Daerah		0-100	
	1.1	Monitoring Capaian Kinerja (CAPKIN) Perangkat Daerah	0-100	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	1.2	Monitoring Penyelesaian TLHP BPK RI	0-100	Inspektorat
	1.3	Monitoring Penyelesaian TLHP APIP	0-100	Inspektorat
	1.4	Monitoring Laporan Realisasi Anggaran APBD	0-100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	1.5	Monitoring Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	0-100	Bagian Organisasi Setda
	1.6	Monitoring Pemanfaatan Sistem PBJ	0-100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
	1.7	Monitoring Indeks Profesionalitas ASN	0-100	BKPSDM
	1.8	Monitoring tindak lanjut pengaduan (LAPOR)	0-100	Dinas Komunikasi dan Informatika

Indikator Penilaian			Nilai	Evaluator
	1.9	Monitoring Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	0-100	Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
	1.10	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	0-100	Inspektorat
	1.11	Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	0-100	Inspektorat
	1.12	Evaluasi Budaya Kerja BerAKHLAK	0-100	BKPSDM
	1.13	Evaluasi Digitalisasi Arsip	0-100	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	1.14	Persentase Realisasi Kinerja PBB Perkotaan & Perdesaan	0-100	Bagian Tata Pemerintahan/ Badan Pendapatan Daerah
	1.15	Evaluasi Penerapan SPBE	0-100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1.16	Evaluasi Pelaksanaan Binwas Pemerintah Desa/Kelurahan		Bagian Tata Pemerintahan Setda
	1.17	Evaluasi Pembinaan KADARKUM	0-100	Bagian Hukum Setda
	1.18	Evaluasi Indikator RB lainnya (bersifat opsional)	0-100	indikator lainnya sesuai dengan kebijakan masing-masing pemerintah daerah
II.	Evaluasi Capaian Dampak Reformasi Birokrasi		0-100	
	2.1	Indeks Pelayanan Publik	0-100	Bagian Organisasi Setda
	2.2	Persentase Capaian Hasil Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan	0-100	Bagian Tata Pemerintahan Setda
	2.3	Persentase Capaian Evaluasi Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang dan Berkembang (EVKEL)	0-100	Bagian Tata Pemerintahan/ Tim Evaluasi Kelurahan (EVKEL) Tingkat Kota
Nilai Evaluasi RB Perangkat Daerah			0-100	

2. Kriteria Penilaian

Nilai akhir hasil evaluasi reformasi birokrasi perangkat daerah dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi. Adapun hasil penilaian tersebut dengan interval nilai 0 – 100 poin yang terbagi dalam 7 (tujuh) kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Istimewa	Penerapan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pelayanan publik yang prima dan telah berkontribusi terhadap perbaikan kinerja organisasi, serta memberikan dampak yang luas terhadap penyelesaian permasalahan yang menjadi core business-nya.
2.	A	>80-90	Memuaskan	Penerapan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pelayanan publik yang prima dan telah berkontribusi terhadap perbaikan kinerja organisasi, serta memberikan dampak terhadap penyelesaian permasalahan yang menjadi <i>core business</i> -nya.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pelayanan publik yang prima dan telah berkontribusi terhadap perbaikan kinerja organisasi, namun belum memberikan dampak terhadap penyelesaian permasalahan yang menjadi core business-nya.
4.	B	>60-70	Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pelayanan publik yang prima, namun belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5.	CC	>50-60	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal telah diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh sebagian besar korupsi, kolusi, dan nepotisme di Perangkat Daerah.
6.	C	>40-50	Kurang Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal hanya diketahui, dipahami dan

No	Kategori	Nilai	Predikat	Interpretasi
				dilaksanakan oleh sebagian kecil aparat sipil negara di Perangkat Daerah.
7.	D	0-40	Tidak Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi belum terlaksana.

3. Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

a. *PTU (Project Transformation Unit)* Sekretariat/Dinas/Badan:

1. Penanggungjawab

: Kepala Perangkat Daerah
2. Ketua

: Sekretaris Perangkat Daerah
3. Sekretaris selaku asesor Perangkat Daerah

: Kepala Bagian pada Biro Umum/Pejabat Pengawas pada Sekretariat Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Tata Usaha
4. Tim Pengampu Kinerja Indikator Evaluasi RB PD

:

1) Capaian Kinerja Perangkat Daerah

: Tim Perencanaan pada Sekretariat Perangkat Daerah

2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah

: Tim Perencanaan pada Sekretariat Perangkat Daerah

3) Nilai Satuan Inovasi Perangkat Daerah

: Tim Perencanaan pada Sekretariat Perangkat Daerah

4) Indeks Pembangunan Statistik

: Tim Perencanaan pada Sekretariat Perangkat Daerah

5) Evaluasi Manajemen Resiko Perangkat Daerah

: Tim Perencanaan pada Sekretariat Perangkat Daerah

6) Tingkat Kematangan Organisasi

: Tim Perencanaan dan Kepagawaian pada Sekretariat Perangkat Daerah

- 7) Persentasi TLHP BPK RI : Tim Keuangan Sekretariat Daerah Pengelola pada Perangkat
- 8) Persentasi TLHP APIP : Tim Keuangan Sekretariat Daerah Pengelola pada Perangkat
- 9) Laporan Realisasi APBD : Tim Keuangan Sekretariat Daerah Pengelola pada Perangkat
- 10) Nilai Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat : Tim Pengaduan dan Kehumasan Sekretariat Daerah Pengelola pada Perangkat
- 11) Indeks Pelayanan Publik : Tim Pengaduan dan Kehumasan Sekretariat Daerah Pengelola pada Perangkat
- 12) Nilai Tindaklanjut Pengaduan (SP4N-LAPOR) : Tim Pengaduan/Kehumasan Sekretariat Daerah Pengelola pada Perangkat
- 13) Nilai Pemanfaatan Sistem PBJ : Tim Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Perangkat Daerah Pengelola
- 14) Persentasi Kepatuhan Penggunaan PDN : Tim Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Perangkat Daerah Pengelola
- 15) Persentasi Kepatuhan Penyampaian LHKAN : Tim Kepegawaian Sekretariat Daerah Pengelola pada Perangkat
- 16) Rata-Rata Skor Arsip Digital ASN (DMS) Pada Aplikasi My ASN : Tim Kepegawaian Sekretariat Daerah Pengelola pada Perangkat

- 17) Budaya Kerja BerAKHLAK : Tim Pengelola Kepegawaian pada Sekretariat Perangkat Daerah
- 18) Nilai Audit Sistem Kerasipan Internal (LAKI) : Tim Pengelola Arsip pada Sekretariat Perangkat Daerah
- 19) Tingkat Digitalisasi Arsip : Tim Pengelola Arsip pada Sekretariat Perangkat Daerah
- 20) Tingkat Pembangunan Zona Integritas : Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pelayanan pada Perangkat Daerah (Bidang Teknis/Cabang Dinas/UPTD/Pusat Pelayanan Pendapatan/ Sekolah/ RSUD/Puskesmas)
- 21) Indeks Pemerintahan Digital : Tim Pengelola Teknologi Informasi pada Perangkat Daerah
- 22) Indeks Kualitas Kebijakan Publik : Bidang yang melaksanakan Penyusunan dan Pelaksana Kebijakan Publik pada Perangkat Daerah (Bidang Teknis Terkait)
- 23) Evaluasi Produk Hukum : Bidang yang melaksanakan Penyusunan Produk Hukum pada Perangkat Daerah (Bidang Teknis Terkait)
- 24) Persentasi Realisasi PBB Sektor Perkotaan Dan Perdesaan : Pejabat yang melaksanakan fungsi bidang Ekonomi dan Pembangunan pada lingkup Pemerintah Kecamatan
- 25) Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan : Pejabat yang melaksanakan fungsi bidang Pemerintahan pada lingkup Pemerintah Kecamatan

- | | | |
|--|---|--|
| 26) Evaluasi Pelaksanaan Kadarkum dan Posbankum | : | Pejabat yang melaksanakan fungsi bidang Pemerintahan/Trantibum pada lingkup Pemerintah Kecamatan |
| 27) Indikator Evaluasi RB lainnya | : | Tim yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan indikator yang ditetapkan |
| 28) Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan | : | Tim Perencana pada Sekretariat Daerah |
| 29) Capaian Dampak Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | : | Tim Pengelola Kehumasan pada Perangkat Daerah |

b. *PTU (Project Transformation Unit)* Lingkup Kecamatan:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Penanggung jawab | : | Camat |
| 2. Ketua | : | Sekretaris Kecamatan |
| 3. Sekretaris selaku asesor | : | Sekretaris Kecamatan atau Pegawai yang ditunjuk untuk menyampaikan penilaian mandiri |
| 4. Pengampu Indikator Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | : | |
| 1) Capaian Kinerja Perangkat Daerah | : | Kasubag Program dan Keuangan/Pejabat Fungsional Perencana/Analisis Perencanaan |
| 2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah | : | Kasubag Program dan Keuangan/Pejabat Fungsional Perencana/Analisis Perencanaan |
| 3) Laporan Realisasi Anggaran | : | Kasubag Program dan Keuangan/Pejabat Fungsional Perencana/Analisis Perencanaan |
| 4) Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP | : | Kasubag Program dan Keuangan/Pejabat Fungsional Perencana/Analisis Perencanaan |
| 5) Nilai Pemanfaatan Sistem PBJ dan Kepatuhan Realisasi P3DN | : | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP) Kecamatan |
| 6) Nilai IP ASN | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian/Pejabat Fungsional/Pengelola Layanan/Pengelola Data |
| 7) Indeks BerAKHLAK | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian/Pejabat Fungsional/Pengelola Layanan/Pengelola Data |
| 8) Tingkat Digitalisasi Arsip | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian/Pejabat Fungsional Arsiparis/ Pengelola Arsip |
| 9) Tindaklanjut SP4N-Lapor | : | Pejabat PPID/Pengelola Layanan Pengaduan |

- | | | |
|--|---|--|
| 10) Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa/Keluurahan | : | Kepala Seksi Pemerintahan dan/atau Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 11) Evaluasi Kinerja Realisasi PBB Perkotaan & Perdesaan | : | Kepala Seksi Pemerintahan dan/atau Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat |
| 12) Evaluasi Pelaksanaan Kelompok Sadar Hukum | : | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan/atau Kepala Seksi Pemerintahan |
| 13) Tingkat Penerapan SPBE | : | Pejabat Fungsional Pranata Komputer/Operator Pengelola Sistem di Kecamatan |
| 14) Evaluasi Pelayanan Publik | : | Kepala Seksi Pelayanan |
| 15) Nilai Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat | : | Kepala Seksi Pelayanan |
| 16) Tingkat Pembangunan Zona Integritas | : | Kepala Seksi Pelayanan |

5. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab PTU

a. Tugas PTU sebagai berikut:

- 1) menyusun dan menetapkan rencana kinerja/rencana aksi Perangkat Daerah;
- 2) melaksanakan dan melaporkan capaian kinerja/capaian rencana aksi Perangkat Daerah;
- 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Perangkat Daerah; dan
- 4) melaksanakan penilaian mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

b. Wewenang PTU sebagai berikut:

- 1) menetapkan Rencana Kinerja/Rencana Aksi Perangkat Daerah setiap tahunnya; dan
- 2) menetapkan hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

c. Tanggung jawab PTU sebagai berikut:

- 1) melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi di lingkup pemerintah daerah; dan
- 2) menyampaikan Hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah kepada Tim Evaluasi melalui Aplikasi Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI).

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR
TENTANG PELAKSANAAN ROADMAP
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025-
2029

TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2029

A. SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH

Pengarah	: 1. Wali Kota; dan 2. Wakil Wali Kota.
Penanggungjawab	: Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU)	: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
Koordinator Pelaksanaan RB General	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
Koordinator Pelaksanaan RB Tematik	: Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
Sekretaris <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU)	: Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.
Anggota <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU)	: 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; 2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; 3. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; 4. Dian Sandiany Hendy, S.STP, MAP Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; 5. Rahadyan, SE., M.I.P Analisis Kebijakan Ahli Muda, Ketua Tim Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi; 6. Rika Susanti, SIP Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi; 7. Niknik Rachmawati, S.Sos Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi; 8. Riza Fauzi Adam Syafa'at, SE Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi.

- Pengampu Indikator RB General : Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan indikator RB General yang diampu.
- Pengampu Indikator RB Tematik : Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan indikator RB Tematik yang diampu.
- Ketua Tim Penilai Internal (TPI) : Inspektur Daerah.
- Sekretaris Tim Penilai Internal (TPI) : Sekretaris Inspektorat.
- Ketua Pelaksana Harian : Irban Khusus pada Inspektorat.
- Anggota Tim Penilai Internal (TPI) :
 1. Firdan Ardjasubrata, ST, M.Si
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Muda pada Inspektorat;
 2. Aldi Rahman Risyandi, S.Sos
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Muda pada Inspektorat;
 3. Nikson Pola Sinaga, S.STP.,S.A.P.,M.Si
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Pertama pada Inspektorat;
 4. Kartika Setianingrum, S.STP, M.Tr.Ip
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Pertama pada Inspektorat;
 5. Asyifa Fauzia Rahma, S.STP.,M.Tr.AP
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Pertama pada Inspektorat.

B. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

No	Tim Pelaksana	Tugas	Tanggungjawab
1.	Pengarah	1. Memberikan Arahan Kebijakan Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Menetapkan Kebijakan Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Memastikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tercapai sesuai dengan target dan sasaran kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan.
2	Penanggungjawab Pelaksana RB	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	a. Memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB General dan RB Tematik telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah; dan

No	Tim Pelaksana	Tugas	Tanggungjawab
		b. Menyusun dan Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota c. Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	b. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kepada Tim Evaluasi Nasional pada Bulan Oktober setiap tahunnya. c. Menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi briokrasi pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota
3	Ketua <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>	Memimpin Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
4	Koordinator Pelaksana RB General	Mengkoordinasikan perangkat daerah yang menjadi pengampu indikator kinerja dalam pelaksanaan RB General	Memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB General telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah
5	Koordinator Pelaksana RB Tematik	Mengkoordinasikan perangkat daerah yang menjadi koordinator pelaksanaan tematik dalam pelaksanaan RB Tematik	Memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB Tematik telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah
6	Sekretaris <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>	Memberikan dukungan administrasi (tata usaha, keuangan maupun sarana dan prasarana) pelaksanaan tugas <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>	Memastikan dukungan administrasi, alokasi anggaran dan sarana prasarana kegiatan pengelolaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i> dapat terpenuhi.
7	Pengampu Indikator RB General	a. Menyusun dan melaksanakan target capaian kinerja pelaksanaan RB General; b. Menyusun, dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General Tahunan; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada	a. Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan RB General Pemerintah Daerah sesuai indikator yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>; dan b. Menyampaikan Nilai Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai

No	Tim Pelaksana	Tugas	Tanggungjawab
		level instansi pemerintah daerah dan pada level perangkat daerah; dan d. Menyusun dan menetapkan rencana aksi tindaklanjut (RATL) atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB General yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.	indikator yang diampu kepada <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU).
8	Pengampu Indikator RB Tematik	a. Menyusun dan melaksanakan identifikasi permasalahan sesuai tema yang ditetapkan dalam RB Tematik; b. Menyusun dan melaksanakan target dan capaian kinerja RB Tematik; c. Menyusun kerangka kerja (<i>logical framework</i>) pelaksanaan RB Tematik yang ditetapkan; d. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik; dan e. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) pelaksanaan RB Tematik atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB Tematik yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.	a. Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan RB Tematik Pemerintah Daerah sesuai tema yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU). b. Menyampaikan Nilai Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai indikator yang diampu kepada <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU).
9	Tim Penilai Internal (TPI)	a. Melaksanakan evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah; dan b. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rekomendasi Perbaikan Ketercapaian Indikator Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah.	Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah kepada Sekretaris Daerah.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen rencana kerja Reformasi Birokrasi tahap pertama dalam rangkaian perencanaan jangka panjang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 telah memasuki tahap awal dari pelaksanaannya dan seiring dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025-2029. Maka, untuk menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandung diperlukan suatu instrument kebijakan yang dapat menjadi tolak ukur dari keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut. Sejalan dengan hal itu, telah terbit Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandung pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka mampu memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025-2029, yang dalam penyusunannya mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Jelas, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
2. Ringkas, disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;

3. Terukur, inisiatif strategis, target, waktu, keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dapat diukur;
4. Dinamis, dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
5. Komitmen, merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan; dan
6. Selaras, dokumen pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung diselaraskan dengan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional; dan
7. Terintegrasi, dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung disusun secara terintegrasi dengan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta terpadu dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

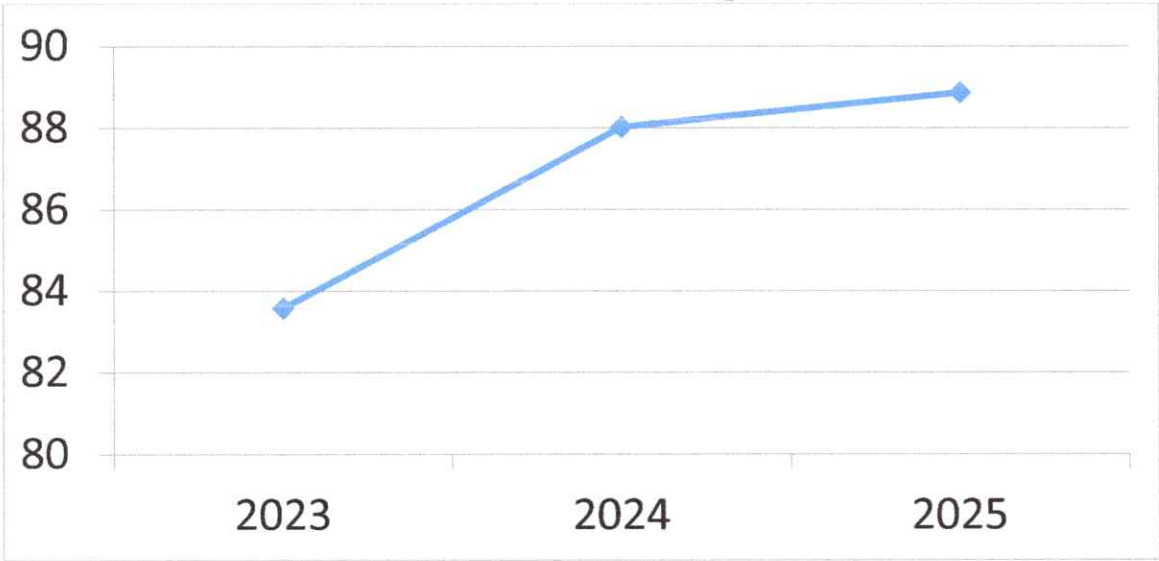
A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 telah mengalami peningkatan yang signifikan yang ditandai dengan peningkatan capain Indeks Reformasi Birokrasi pemerintah daerah Kota Bandung secara signifikan. Peningkatan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pemerintah daerah Kota Bandung tersebut, dapat tergambar dari capaian pelaksanaan pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagai berikut:

1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Pemerintah Daerah Kota Bandung selama periode Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2025 telah berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam konstelasi nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung juga menjadi salah satu yang terbaik, dimana berdasarkan capaian Tahun 2023-2025 Pemerintah Daerah Kota Bandung mencapai Kategori **“A-”** dengan Predikat **“Memuaskan dengan Catatan”**. Adapun progres capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bandung selama kurun waktu Tahun 2023 – 2025 tergambar pada Grafik 2.1

Grafik 2.1.
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Kota Bandung 2023 – 2025



TAHUN	2023	2024	2025
CAPAIAN	83,58	88,02	88,86
SELISIH		4,44	0,84
PREDIKAT	A-	A-	A-

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB, 2023-2025

Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi tanggal 10 April 2026 Nomor: B/315/RB.06/2026 Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025, Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung Memperoleh Nilai 88,86 dengan kategori **A-** atau mengalami kenaikan sebesar 0,84 point dari capaian pada Tahun 2024 dengan Nilai 88,02 dengan rincian penilaian evaluasi periode Tahun 2024 s.d 2025 adalah sebagai mana pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung
Tahun 2024 – 2025

NO	PENILAIAN	BOBOT	2024	2025
A	RB General	100	75,81	76,16
B	RB Tematik	20	12,21	12,70
C	Indkes RB	120	88,02	88,86
			A-	A-

Sumber : LHE RB Kota Bandung Tahun 2024-2025

2. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandung

Isu strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandung pada umumnya tidak terlepas dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional terbagi kedalam dua isu strategis yaitu:

a. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/ pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis

menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PAN-RB telah menetapkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible*, *changeable*, dan *moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga

budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

b. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

- 2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi.

Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

a. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

b. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Selain isu Reformasi Birokrasi Nasional secara umum di atas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandung, terdapat permasalahan yang terjadi. Walaupun dari sisi capaian indeks Reformasi Birokrasi yang sudah relatif baik, namun capaian tersebut belum dirasakan secara signifikan oleh

masyarakat di Kota Bandung. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah terjadi baru sampai pada tahap perbaikan tata kelola pemerintahan saja, belum secara nyata berdampak terhadap publik. Salah satu indikator yang menunjukkan hal tersebut, terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Pemerintah Kota Bandung yang mencapai 3,78% pada tahun 2025 dari total seluruh penduduk Kota Bandung.

Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terjadi di Pemerintah Kota Bandung diantaranya sebagai berikut:

a. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian indeks Reformasi Birokrasi. Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang selama ini telah berjalan melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang bersifat koordinatif dirasakan belum efektif dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) masih terdapat persepsi atas pemahaman anggapan diantara Tim Reformasi Birokrasi yang dibentuk, bahwa capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi itu menjadi tanggungjawab salah satu Perangkat Daerah/ Unit Kerja semata, sehingga hal ini menyebabkan kurang efektifnya komunikasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah/ Unit Kerja dalam implementasi dilapangan;
- 2) belum adanya pembagian peran yang jelas diantara pengampu indikator kinerja Reformasi Birokrasi. Hal ini dikarenakan dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, komponen-komponen pembentuk atau *Critical Succes Factor (CSF)* Reformasi Birokrasi tidak menjadi sasaran kinerja di perangkat daerah, sehingga seolah-olah Reformasi Birokrasi terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan yang ada.
- 3) pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah belum sepenuhnya berjalan optimal pada pola koordinasi, komunikasi dan advokasi yang dilakukan oleh koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah berada pada level menengah (*midle level*) yang seharusnya dikoordinasikan pada level kepala perangkat daerah (*high level*); dan
- 4) belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh jajaran baik ASN maupun *stakeholders* lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan

implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan unit kerjanya masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan gaung pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak tersampaikan dengan baik kepada publik.

- 5) evaluasi rencana aksi agen perubahan belum dilakukan secara maksimal dan belum adanya mekanisme pemberian *reward and acknowledgement* bagi agen perubahan apabila proyek perubahannya berhasil.
- 6) regulasi atau kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kota Bandung belum dilakukan pemetaan atas dampak dari kebijakan yang dihasilkan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan.

b. Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025, ketercapaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bandung secara umum masih dibawah dari yang diharapkan. Beberapa indikator strategis seperti Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI, Tingkat Digitalisasi Arsip, Indeks Sistem Merit, Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik, Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, Indeks Berakhlak, Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE yang sebagian besar masih dibawah target. Capaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI

Capaian Indikator Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI di Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025 dengan realisasi 0 dari target 4 dengan capaian 0%.

2. Tingkat Digitaliasasi Arsip

Capaian Indikator Tingkat Digitalisasi Arsip di Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025 dengan realisasi 74,91 dari dari target 78 dengan capaian 96,04%.

3. Indeks Sistem Merit

Capaian Indikator Indeks Sistem Merit di Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025 dengan realisasi 359,50 dari target 364,90 dengan capaian 98,52%.

4. Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik

Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025 dengan realisasi 82 dari target 93 dengan capaian 88,17%.

5. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Capaian Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi BPK di Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025 dengan realisasi 84,43 dari target 85 dengan capaian 99,33%.

6. Indeks Berakhlak

Capaian Indeks Berakhlak Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025 dengan realisasi 82,90 dari target 83,50 dengan capaian 99,28%.

7. Survei Penilaian Integritas (SPI)

Capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Bandung Tahun 2025 dengan realisasi 69,17 dari target 70,14 dengan capaian 98,62%.

8. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE

Capaian Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE Tahun 2025 di Pemerintah Kota Bandung dengan realisasi 0 dari target 3 dengan capaian 0%.

Ketercapaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini merupakan gambaran dari implementasi nyata dilapangan bahwa tata kelola pemerintahan yang tercermin dari indikator tersebut menunjukkan bahwa di Pemerintah Kota Bandung masih terdapat kelemahan dalam hal perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan tata kelola yang dilakukan belum merata pada seluruh pemerintah daerah sehingga masih terjadi beberapa ketimpangan antara yang sudah menerapkan reformasi birokrasi secara komprehensif dengan yang masih stagnan dalam pelaksanaan reformasi birokrasinya.

c. Arah kebijakan RB Nasional Tahun 2025 – 2045

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025, arah kebijakan RB Nasional Tahun 2025-2045 dirumuskan dengan memperhatikan tantangan dan pembelajaran pelaksanaan RB sebelumnya, yaitu:

1. birokrasi sebagai mesin penggerak pembangunan.

RB merupakan prasyarat utama bagi tercapainya visi Indonesia sebagai negara maju. Birokrasi diharapkan menjadi mesin yang kuat, efisien, dan efektif dalam menggerakkan seluruh program pembangunan nasional, bukan sekadar sebagai pelaksana kebijakan, melainkan sebagai penggerak utama transformasi tata kelola dan peningkatan kualitas layanan publik.

2. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan. Birokrasi yang modern, transparan, dan adaptif merupakan kunci dalam memperkuat daya saing global. Agenda RB mendukung penguatan prinsip-prinsip good governance, merespons perubahan dalam ekonomi global, serta menciptakan ekosistem inovasi di sektor publik.
3. berdampak pada capaian target pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan daya saing global
Pelaksanaan RB difokuskan pada perbaikan kualitas layanan publik, peningkatan efektivitas tata kelola, peningkatan capaian kinerja pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, serta diharapkan mampu memenuhi standar birokrasi berkelas dunia.
4. penguatan Sumber Daya Manusia ASN sebagai Modal Utama
Penguatan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) dipandang sebagai modal utama dalam keberhasilan RB. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi digital, penguatan integritas, dan pengembangan profesionalisme ASN dalam menghadapi disrupsi global dan meningkatnya kompleksitas tuntutan pelayanan publik.
5. mengatasi Tantangan Struktural: Netralitas, Patronase dan Fragmentasi.
RB diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan struktural, seperti persoalan netralitas ASN, praktik patronase, serta fragmentasi kelembagaan. Upaya reformasi perlu memperkuat integritas dan netralitas ASN, serta mencegah terjadinya praktik jual-beli jabatan dan budaya birokrasi yang patronistik.

Arah kebijakan RB Nasional Tahun 2025-2045 tertuang dalam perencanaan strategis Reformasi Birokrasi jangka panjang melalui GDRBN 2025-2045. GDRBN disusun selaras dengan RPJPN yang dioperasionalkan melalui RMRBN lima tahunan selaras dengan RPJMN.

d. Ketercapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Target Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bandung pada tahun 2025 belum sepenuhnya tercapai. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja pembangunan ditandai dengan sejauhmana ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana termaktub dalam sasaran strategis RPJMD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025-2029. Berdasarkan data LKIP ketercapaian IKU Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2025 masih terdapat IKU yang tidak tercapai salah satunya adalah yang terkait dengan Angka Kemiskinan dengan target 3,68 realiasi 3,78 capaian 97,28%, Nilai Reformasi Birokrasi General dengan target 77,00 realiasi 76,59 dan capaian 99,94%.

TABEL 2.2.
Ketercapaian IKU Pemerintah Daerah Kota Bandung
Tahun 2025

TAHUN	JUMLAH IKU	IKU TERCAPAI	PERSENTASE
2025	20	17	85%

Sumber: LKIP Pemerintah Kota Bandung 2025

Mencermati data-data diatas, maka diperlukan upaya yang nyata dan signifikan dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga mampu memberikan dampak yang nyata kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung. Upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya melalui beberapa terobosan dan inovasi yang fundamental diantaranya:

1. membentuk unit pengelola Reformasi Birokrasi yang merupakan unsur pimpinan langsung yang mampu melaksanakan fungsi koordinasi, advokasi monitoring dan memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi Reformasi Birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif bahwa keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat merupakan akibat dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Unit pengelola Reformasi Birokrasi ini harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah;
2. menetapkan pembagian peran penanggungjawab capaian indikator (*leading institution*) dari Indikator capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara tegas dan jelas didalam dokumen perencanaan pembangunan baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Level Kota maupun Rencana Strategis (Renstra) di Level Perangkat Daerah; dan
3. menyusun strategi arsitektur kinerja pembangunan dalam hal penanganan permasalahan sosial masyarakat, seperti halnya untuk program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara kebijakan dan program pada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kota, sehingga mampu memetakan pembagian peran dan pembagian sumber daya antar level pemerintahan yang disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
TAHUN 2026-2029

A. Arah kebijakan Reformasi Birokrasi

Visi dan Misi Kota Bandung

Pelaksanaan Reformasi Biorkrasi Pemerintah Kota Bandung sejalan dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2025-2029 dengan visi sebagai berikut:

**"MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, TERBUKA,
AMANAH, MAJU DAN AGAMIS MELALUI PEMERINTAHAN YANG
BERORIENTASI MELAYANI SERTA BERKELANJUTAN DALAM
MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL"**

Adapun penjabaran makna visi adalah sebagai berikut:

- Unggul :** Kota dengan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing. Pembangunan manusia seutuhnya membuka peluang dan memperluas kesempatan setiap individu mendapatkan layanan publik pada seluruh siklus hidup, secara inklusif, dan menerapkan prinsip kesetaraan gender untuk menjalani kehidupan yang bermakna.
- Terbuka :** Kota yang terbuka untuk menerima kritik, gagasan dan bersifat kolaboratif, partisipatif, dan transparan; menjamin akses informasi, ruang partisipasi, serta keterbukaan dalam pengelolaan pembangunan sebagai ciri kota modern yang inklusif dalam pembangunan secara kolaboratif dengan entitas pemerintahan secara vertikal dan horizontal dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan.
- Amanah :** Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, menjunjung tinggi etika pelayanan publik, menjamin perlindungan terhadap kelompok marginal, berorientasi melayani, amanah dalam pengelolaan aset, sumber daya alam dan pengelolaan anggaran, serta penguatan sistem merit.
- Maju :** Kota yang berinovasi dan adaptif terhadap perubahan global, berbasis teknologi, ilmu pengetahuan, dan tata kelola berbasis data. Pembangunan kota yang progresif dan terencana secara ilmiah dan akuntabel dalam hal-hal baru untuk melakukan lompatan pembangunan, baik melalui pemanfaatan digitalisasi maupun social

engineering yang berfokus pada keadilan bagi masyarakat rentan. Perwujudan kebudayaan dan kesenian sebagai warisan nilai luhur dalam menghadapi era *borderless global community*, pengembangan Bandung sebagai kota jasa dan pariwisata termaju di Indonesia yang mengutamakan pelestarian lingkungan hidup berbasis *public private partnership*.

Agamis :	Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas, toleransi, harmoni sosial dalam praktik keagamaan yang moderat dan solutif. Keseimbangan antara pembangunan fisik dan spiritual, serta penguatan karakter warga Bandung yang cageur, bageur, pinter jeung singer.
Berorientasi Melayani :	Pergeseran paradigma birokrasi yang berorientasi pada kekuasaan menjadi birokrasi yang berorientasi melayani dengan implikasi berupa penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan, kebijakan berbasis <i>scientific certainty</i> , penguatan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan dan evaluasi, pengembangan kompetensi aparatur dalam <i>soft skills</i> seperti empati, komunikasi, dan problem solving, serta perubahan indikator kinerja dari <i>input & process-based</i> ke <i>outcome & impact-based</i> .
Berkelanjutan:	Pembangunan kota dilakukan dengan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Berkelanjutan adalah tentang hidup bernegara yang dijalani dengan prinsip keadilan lintas generasi, berpikir jauh ke depan, untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan resilien.
Mendukung Pembangunan Nasional :	Pembangunan selain dalam rangka mewujudkan visi kota, juga ditujukan untuk mendukung pembangunan nasional dan provinsi. Sinergi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan antar tingkatan pemerintahan diharapkan dapat mengakselerasi seluruh kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara berkelanjutan dan inklusif.

Visi menegaskan tekad Kota Bandung untuk membangun dengan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, serta tata kelola yang melayani dan responsif. Visi ini juga menjadi jawaban atas tantangan multidimensional, seperti urbanisasi yang cepat dan tidak merata; kualitas pelayanan publik yang belum merata; ketimpangan sosial dan spasial antar wilayah; persoalan tata lingkungan dan pengelolaan sampah; rendahnya partisipasi dan literasi digital masyarakat dalam proses pembangunan; dan krisis kepercayaan

terhadap pemerintahan daerah pasca berbagai dinamika kelembagaan. Dengan rumusan tersebut, arah pembangunan Kota Bandung tidak hanya menysasar pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga pada transformasi sosial, penguatan nilai-nilai budaya, dan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien, Pemerintah Kota Bandung secara spesifik menjadikan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerja sesuai dengan tujuan pada Misi ke-3 (tiga) dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Amanah, Profesional, Akuntabel, dan Inovatif.

A. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI GENERAL PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2029

No	Kegiatan Utama	Indikator	Bobot	Baseline 2025	Satuan	Tahun Pelaksanaan				Perangkat Daerah (PD)	
						2026	2027	2028	2029	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	3	4,00	Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	Setda (Bag.Organisasi)	Seluruh PD
2	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	9	4,66	Indeks	4,68	4,71	4,74	4,75	Diskominfo	Seluruh PD
3		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	2,5	0	Indeks	3	3	3	4	Diskominfo	Seluruh PD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	4	82,26	Poin	82,31	82,68	83,05	83,42	Bapperida, Setda (Bag.Organisasi), Inspektorat	Seluruh PD
5	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	3,5	0	Perangkat Daerah	4	4	4	4	Inspektorat Daerah	Seluruh PD

6	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	4	3,10	Nilai	3,12	3,2	3,2	3,4	Setda (Bag. Organisasi) (Penilaian Mandiri) Inspektorat (Penjaminan Kualitas)	Seluruh PD
7	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	2,5	4	Indeks	4	4	4	5	Diskominfo	Seluruh PD
8	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	10	69,17	Indeks	-	70	-	71	Inspektorat Daerah	Seluruh PD
9	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	2,5	88,90	Nilai	89	89,5	90	90,5	Setda (Bag. Hukum)	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	2,5	97,64	Nilai	98	98,3	98,6	98,9	Setda (Bag. Hukum)	Seluruh PD
11	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	74,91	nilai	78,3	78,6	78,9	79,2	Disarpus	Seluruh PD
12	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	3,04	Indeks	3,05	3,06	3,07	3,08	Diskominfo	Seluruh PD
13	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	85,01	Skor ITKP	86,30	89,80	91,22	92,70	Setda (Bag. PBJ)	Seluruh PD

14	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	5	WTP	Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD	Seluruh PD
15		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	4	84,43	%	84,43	84,43	84,43	84,43	Inspektorat Daerah	Seluruh PD
16	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	4	359,50	Indeks	369	373,1	377,2	381,3	BKPSDM	Seluruh PD
17	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	4	82,90	Indeks	84,17	84,83	85,48	86,83	BKPSDM	Seluruh PD
18	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	8	89,08	Indeks	85,15	85,2	85,25	85,3	Setda (Bag.Organisasi)	Seluruh PD
19		Indeks Pelayanan Publik	2	4,73	%	31	31	31	31	Setda (Bag.Organisasi)	Seluruh PD
20		Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	2	93,00	Indeks	93,15	93,15	93,15	93,15	Setda (Bag.Organisasi)	Seluruh PD

B. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2029

No	Kegiatan Utama	Indikator	Sub Indikator	Baseline 2025	Satuan	Tahun Pelaksanaan				Perangkat Daerah (PD)	
						2026	2027	2028	2029	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna		57,46	%	57,46	57,66	57,86	58,06	Dinas Kesehatan	PD Terkait
2	Mendorong Hilirisasi	Presentase Pelaku Industri Kecil Menengah Berdaya Saing	Presentase Industri Kecil Menengah yang meningkat daya saingnya	10,69	%	12,55	14,41	16,26	18,12	Baperida	Disdagin dan PD Terkait
3	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan		74,43	Nilai	75,92	77,96	80,01	82,05	Dispangtan	PD Terkait
4	Realisasi Investasi	Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi PMDN dan PMA	11,07	Triliun	11,363	12,022	12.737	13.512	DPMPTSP	PD Terkait

5	Peningkatan Akses, Kualitas, dan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah		Tahun	14,27	14,28	14,29	14,3	Dinas Pendidikan	PD Terkait
			Angka Rata rata lama Sekolah		Tahun	11,09	11,11	11,13	11,15	Dinas Pendidikan	PD Terkait
		Indeks Standar Pelayanan Minimal			Tahun	81,94	82,29	82,69	83,14	Dinas Pendidikan	PD Terkait
		Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaran			%	100	100	100	100	Dinas Pendidikan	PD Terkait
6	Pengentasan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan		3,68	%	3,58	3,48	3,38	3,28	Baperida	Dinsos dan PD Terkait

**C. PENANGGUNGJAWAB PENGAMPU INDIKATOR (LEADING INSTITUTION)
PELAKSANAAN RB GENERAL**

1. Koordinator Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Penanggung jawab Indikator :

No	Kegiatan Utama	Indikator	Perangkat Daerah (PD)	
			Penanggung Jawab	Pelaksana
1	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	Setda (Bag.Organisasi)	Seluruh PD
2	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Diskominfo	Seluruh PD
3		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	Diskominfo	Seluruh PD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	Bapperida, Setda (Bag.Organisasi), Inspektorat	Seluruh PD
5	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	Inspektorat Daerah	Seluruh PD
6	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Setda (Bag.Organisasi) (Penilaian Mandiri) Inspektorat (Penjaminan Kualitas)	Seluruh PD
7	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Diskominfo	Seluruh PD
8	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Inspektorat Daerah	Seluruh PD
9	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Setda (Bag. Hukum)	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Setda (Bag. Hukum)	Seluruh PD
11	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Disarpus	Seluruh PD
12	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo	Seluruh PD
13	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Setda (Bag. PBJ)	Seluruh PD

14	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	BKAD	Seluruh PD
15		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Inspektorat Daerah	Seluruh PD
16	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	BKPSDM	Seluruh PD
17	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	BKPSDM	Seluruh PD
18	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Setda (Bag.Organisasi)	Seluruh PD
19		Indeks Pelayanan Publik	Setda (Bag.Organisasi)	Seluruh PD
20		Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	Setda (Bag.Organisasi)	Seluruh PD

D. KOORDINATOR PENGAMPU TEMATIK (LEADING SECTOR) PELAKSANAAN RB TEMATIK

1. Koordinator Penanggung jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
2. Penanggung jawab Indikator :

No	Kegiatan Utama	Indikator	Perangkat Daerah (PD)	
			Penanggung Jawab	Pelaksana
1	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna	Dinas Kesehatan	PD Terkait
2	Mendorong Hilirisasi	Presentase Pelaku Industri Kecil Menengah Berdaya Saing	Baperida	Disdagin dan PD Terkait
3	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Dispangtan	PD Terkait
4	Realisasi Investasi	Jumlah Realisasi Investasi	DPMPTSP	PD Terkait

5	Peningkatan Akses, Kualitas, dan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Dinas Pendidikan	PD Terkait
			Dinas Pendidikan	PD Terkait
		Indeks Standar Pelayanan Minimal	Dinas Pendidikan	PD Terkait
		Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	Dinas Pendidikan	PD Terkait
6	Pengentasan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Baperida	Dinsos dan PD Terkait

E. TIM EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN RB PEMERINTAH DAERAH

Ketua Tim Evaluasi Internal : Inspektur Daerah
 Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
 Ketua Pelaksana : Irban Khusus
 Anggota : Tim TPI RB General & Tematik :
 1.
 NIP :
 2.
 NIP :
 3.
 NIP

F. PEDOMAN PENYUSUNAN TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH PROJECT TRANSFORMATION UNIT (PTU)

1. Ketua PTU : Kepala Perangkat Daerah
 2. Pelaksana RB General :
 - Ketua Pelaksana RB General : Sekretaris Perangkat Daerah
 - Sekretaris : Merupakan Pejabat Struktural dan atau Pejabat Fungsional yang disetarakan
 - Anggota : 1. (by name)
 2. (by name)
 3. Dst sesuai kebutuhan
 Merupakan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada Perangkat Daerah

3. Pelaksana RB Tematik :

- Ketua Pelaksana RB Tematik : Kepala Bidang Teknis Terkait Tema yang diambil
- Sekretaris : Merupakan Pejabat Struktural dan atau Pejabat Fungsional yang disetarakan
- Anggota :
 1. (by name)
 2. (by name)
 3. Dst sesuai kebutuhanMerupakan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

Reformasi birokrasi akan membawa banyak perubahan terutama dalam peningkatan kinerja pegawai, alur dan mekanisme kerja menjadi lebih jelas dan terarah, pencapaian target kinerja yang lebih cepat dan jelas yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan baik yang bersifat substansial maupun prosedural.

Reformasi Birokrasi adalah sebuah proses yang harus terus dikawal dan dilaksanakan. Pemerintah Kota Bandung harus berubah menjadi sebuah organisasi yang dinamis dan aktif untuk melakukan perubahan positif untuk menyikapi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pemerintah Kota Bandung hingga saat ini terus melakukan berbagai pembenahan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing Perangkat Daerah baik peningkatan kualitas kinerja yang pada akhirnya akan bermuara pada sasaran reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang bebas KKN, birokrasi yang efektif dan efisien serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Diharapkan dengan adanya Road Map Reformasi Birokrasi Kota Bandung 2025-2029, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dapat berjalan lebih baik lagi sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi Pemerintah Kota Bandung tersendiri dan masyarakat umum secara keseluruhan.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002